

Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Kluster

Kacung Marijan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga

ABSTRAK

Industrial sector in Indonesia has been dominated by small and medium enterprises (SMEs). Many of them are clustered in particular areas. Unfortunately, most of them are passive cluster industries. As a consequence, they only enjoyed external economies. They will be active clusters when they are able to carry out joint action in overcoming their common problems. This paper argues that in order to develop SMEs, we can apply cluster approach that supports the existence of an active cluster. Therefore, SMEs would be able to compete in international market.

Keywords:

cluster industry, collective efficiency

Transformasi struktur perekonomian Indonesia, dari yang berbasis agraria ke yang berbasis industri, khususnya industri manufaktur, telah mengalami stagnansi setelah krisis ekonomi yang melilit tajam Indonesia pada medium 1997. Bahkan, kalau dilihat dari industri berkategori besar, Indonesia telah mengalami de-industrialisasi. Penurunan jumlah industri besar ini disebabkan karena sebagian *collapse*, ada pula yang melakukan relokasi ke negara-negara lain. Pada saat yang sama, salah satu *big push factor* bagi tumbuhnya industri, yaitu arus investasi, baik PMA maupun PMDN, juga

mengalami penurunan kalau dibandingkan sebelum krisis.

Meskipun demikian, harapan bagi bangkitnya kembali sektor industri sebagaimana terjadi antara 1970an sampai sebelum krisis ekonomi 1997, tidak ikut stagnan. Pintu masuk bagi harapan demikian adalah relatif resistensinya kelompok industri kecil menengah, termasuk di dalamnya adalah industri berskala mikro, ketika krisis berlangsung. Kalau jumlah industri besar mengalami penurunan, jumlah industri kecil menengah justru justru mengalami kenaikan. Yang menjadi masalah adalah, mampukah industri kecil menengah ini berfungsi sebagai *break-through* bagi bangkitnya kembali sektor industri di Indonesia? Pertanyaan demikian dikemukakan setelah melihat realitas bahwa pesaing

industri Indonesia saat ini adalah industri-industri besar berskala internasional (multi-nasional) yang memiliki daya saing (*competitiveness*) tinggi

Tulisan ini dibangun dari argumentasi bahwa upaya mengembangkan industri kecil menengah yang mampu bersaing di pasar internasional bisa dilakukan melalui pendekatan kluster (*cluster approach*). Sebelum membahas apa itu pendekatan kluster dan bagaimana pendekatan ini menggerakkan berkembangnya industri kecil menengah, terlebih dahulu dikemukakan potret industri kecil menengah dan kluster industri di Indonesia.

IKM dan Kluster

Secara historis, industrialisasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya setelah pemerintah kolonial Belanda mengintrodusir sistem tanam paksa (*cultivation system*) pada 1830-an (Maddison, 1989). Pada periode ini, sejumlah industri seperti industri makanan dan minuman, tekstile dan rokok kretek telah ditemukan. Meskipun demikian, Pangestu dan Sato (1997:xi) berpendapat bahwa industrialisasi modern di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto berkuasa pada pertengahan 1960-an. Pemerintah Orde Baru secara sengaja bermaksud merombak struktur ekonomi Indonesia, dari yang berbasis pada sektor pertanian ke yang berbasis pada sector industri. Sebagaimana di negara-negara sedang berkembang lainnya, industrialisasi telah dipandang sebagai instrument penting untuk mencapai standard kehidupan masyarakat yang tinggi sebagaimana terjadi

di negara-negara industri. (Hughes, 1984). Realitas memang menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran rakyat negara-negara industri memang jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang mengandalkan sektor pertanian.

Usaha pemerintah Orde Baru itu memang tidak sia-sia. Sejak pemerintahan Orde Baru telah terjadi transformasi yang cukup besar struktur ekonomi Indonesia. Pada 1960-an, misalnya, sumbangan sektor pertanian kepada GDP masih mencapai 53 persen. Pada awal 1990-an, sumbangan sektor pertanian kepada GDP turun menjadi 19 persen. Sebaliknya, sumbangan sektor industri manufaktur mengalami pelonjakan sampai tiga kali lipat, yakni dari hanya 8 persen mencapai 24 persen pada kurun waktu yang sama (Aswicahyono, 1997:2; Hill, 2000:5).

Sebagaimana di negara-negara yang sedang berproses di dalam industrialisasi, tidak semua industri yang ada itu merupakan industri besar. Yang terkatagori industri besar biasanya adalah industri-industri yang muncul karena proyek-proyek PMA atau proyek-proyek PMDN yang didirikan oleh keluarga-keluarga kaya. Tetapi, sebagian besar industri yang muncul adalah yang berkatagori kecil menengah. Kelompok ini muncul bukan semata-mata karena kita sedang berproses di dalam industrialisasi. Kemunculan industri kecil menengah tidak jarang merupakan *multiplier effects* dari industri-industri besar.

Sampai tahun 2000-an, kelompok industri yang terkatagori mikro, kecil dan menengah tergolong yang paling besar di Indonesia. Sebagaimana terlihat pada table

1, kalau kelompok industri mikro dan kecil sangat mendominasi struktur industri di Indonesia. Bahkan, sekiranya data tentang industri menengah itu dipisahkan dari kelompok industri besar, jumlah industri besar akan menjadi minoritas.

Belanda yang serius mengkaji kluster di Indonesia, Weijland, memperkirakan bahwa lebih dari 40 persen kluster industri di Indonesia berada di Jawa Tengah (Weijland, 1999:1518). Perkiraan demikian didukung oleh data yang lain. Misalnya, Klapwijk

Table 1. Jumlah industri di Indonesia Th. 2000-2003

Type of Establishment	Year			
	2000	2001	2002	2003
Household	2,358,616	2,307,562	2,490,118	2,672,864
Small	240,088	230,721	238,582	255,144
Large and Medium	22,174	21,396	21,146	21,126

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Statistical Year Book of Indonesia* 2002 and 2003.

Yang menarik adalah, tidak sedikit industri kecil menengah itu cenderung mengelompok di dalam wilayah tertentu (*clustered*). Kecenderungan demikian bukan kahs Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Boadway *et al.* (2004:623) ‘kegiatan ekonomi pada dasarnya cenderung mengkluster’, khususnya aktivitas ekonomi yang bergerak di sektor serupa.

Di Indonesia, sebagian besar kelompok-kelompok industri (*cluster*) itu muncul secara spontan, yang dirangsang oleh banyaknya bahan baku dan tenaga kerja yang trampil (Klapwijk, 1997; Poot *et al.*, 1990; Sandee, 1995; Tambunan, 2000; Weijland, 1999). Yang unik, banyak kluster ada di Jawa Tengah. Dari 5,715 kluster di Jawa pada 1998, 53,6 persen berada di Jawa Tengah. Besaran persentase demikian setara dengan 25,2 persen dari seluruh kluster di Indonesia. Bahkan, seorang ekonom

(1997:45) menemukan bukti bahwa dari 4,400 sentra-sentra industri di Jawa pada 1989, 90,9 persen di antaranya terkatagori kluster industri yang ada di pedesaan.

Melihat banyaknya industri-industri yang mengkluster itu, pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan pembinaan. Sebagaimana terlihat pada table 2. Pembinaan itu, khususnya yang berkaitan dengan bantuan teknis dan keuangan.

Bantuan teknis, misalnya, dalam bentuk pendirian UPT (Unit Pelaksana Teknis) tertentu, seperti UPT yang berkaitan dengan industri kulit, kayu dan yang lain. Melalui UPT ini pemerintah juga sekaligus memperkenalkan teknologi dan *knowledge* baru guna memperbaiki kualitas produksi yang dihasilkan industri-industri yang ada di lingkungan kluster itu (Thee, 1989:20). Selain itu, UPT juga berfungsi untuk

**Tabel 2. Jumlah Kluster yang Memperoleh Pembinaan dari Pemerintah
Th. 1992, 1994, dan 1998**

Propinsi	1992	1994	1998
D.I. Aceh	192	192	441
Sumatra Utara	613	639	636
Sumatra Barat	313	313	590
Riau	151	180	292
Jambi	83	83	88
Bengkulu	97	107	126
Sumatra Selatan	175	175	196
Lampung	108	108	142
DKI Jakarta	127	127	92
Jawa Barat	921	921	1089
Jawa Tengah	970	970	3061
D.I. Yogyakarta	520	520	264
Jawa Tengah	1007	1204	1209
Kalimantan Selatan	250	313	417
Kalimantan Barat	121	121	121
Kalimantan Tengah	151	151	253
Kalimantan Timur	193	215	388
Bali	577	677	782
Nusa Tenggara Barat	275	275	504
Nusa Tenggara Timur	169	238	27
Sulawesi Selatan	453	538	538
Sulawesi Utara	253	253	253
Sulawesi Tenggara	83	83	189
Maluku Tengah	172	172	83
Maluku	219	257	257
Papua	85	110	124
Timor Timur	69	101	*
Total	8329	9022	12162

* Pada 1998 Timor Timur tidak dimasukkan karena dalam proses merdeka.

Sumber: Tulus Tambunan, *Development of Small-Scale Industries during the New Order Government in Indonesia*, Ashgate, Singapore, 2000:116-117; Deperindag, *Industri Kecil dalam Angka tahun 2000*, Deperindag, Jakarta, 2000:79.

memberikan pelatihan manajemen dan menambah ketrampilan tenaga kerja yang tersedia. Di tempat tertentu, UPT bahkan bisa berfungsi untuk menyediakan bahan-bahan material untuk keperluan produksi (Thee 1993:14)

Sementara itu, bantuan finansial mencakup pemberian konsesi kredit. Untuk itu, pemerintah telah memperkenalkan program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Kedua jenis kredit ini dikoordinasikan oleh

Bank Indonesia. Tetapi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bank-bank komersial, baik milik pemerintah maupun swasta (Bolnick, 1982; Levitsky, 2001). Caranya, BI menyediakan kredit dengan bunga rendah kepada bank-bank tersebut (sekitar tiga sampai enam persen pertahun), dan kemudian bank-bank tersebut memberikan kredit dengan bunga yang lebih rendah di pasaran kepada perusahaan-perusahaan kecil menengah yang membutuhkannya (Pangestu, 1996).

Sayangnya, tidak semua program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah itu berlangsung secara baik. Program konsesi kredit, misalnya, tidak berlangsung secara efektif (Grizzell 1988; Hamid 1991; Hayashi 2002; Hill 2001; Thee 1993). Hal ini terlihat dari tingginya tingkat *default* dari para peminjam. Konsekuensinya, tidak sedikit kredit KIK/KMKP itu yang macet.

Pendekatan Kluster: Apa dan Mengapa?

Di dalam literatur, ada tiga konsep yang berkaitan dengan lokalisasi industri, yaitu kluster industri (*cluster industry*), industri berbasis daerah (*industrial district*) dan aglomerasi ekonomi (*agglomeration economy*). Dua konsep yang pertama sering dipakai secara bergantian (*interchangeably*). Konsep-konsep itu dikaitkan dengan pengelompokan industri secara sektoral dan secara geografis. Konsep aglomerasi ekonomi dikaitkan dengan industri-industri yang memperoleh keuntungan akibat urbanisasi ekonomi (*urbanisation economies*) dan lokalisasi ekonomi (*localisation economies*). Hanya saja, secara umum, dua konsep

pertama sering dipakai di dalam literatur secara bergantian.

Kluster industri sendiri sering dibatasi melalui dua cara yang berbeda. Pertama adalah dibatasi secara fungsional. Sebagaimana dikemukakan oleh Michael Porter (1990; 2000) kluster industri lebih dipandang sebagai sekelompok perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan yang serupa di dalam suatu ekonomi nasional daripada hanya sekadar terletak di dalam lokasi tertentu. Karena itu, faktor yang paling penting di dalam kluster industri adalah adanya keterkaitan (*linkages*) antara perusahaan-perusahaan di dalam sektor tertentu atau dengan sektor-sektor yang lain tetapi saling mendukung. Aspek kewilayahan tidak dibatasi secara kaku. Kedua, kluster industri ditekankan pada sekelompok industri yang ada di dalam wilayah tertentu. Hal ini, misalnya terlihat dari batasan Schmitz dan Nadvi yang melihat kluster industri sebagai '*sectoral and spatial concentration of firms*' (Schmitz and Nadvi 1999:1503).

Dalam perkembangannya, pemahaman tentang kluster mencakup dua hal sekaligus, yakni secara fungsional dan geografis. Studi tentang kluster di banyak negara, baik di negara-negara maju maupun sedang berkembang, menunjukkan bahwa kluster pada dasarnya tidak sekadar kumpulan perusahaan-perusahaan yang berada pada suatu tempat tertentu (*spasial*). Lebih dari itu, kluster berarti adanya keterkaitan (*linkages*) di antara perusahaan-perusahaan itu, baik vertikal maupun horisontal. Melalui *linkages*, perusahaan-perusahaan yang ada itu tidak sekadar bersaing (*competition*) antara yang satu dengan

yang lain, melainkan juga melakukan kersajama (*cooperation*).

Karakter kluster yang seperti itu dilihat memiliki potensi di dalam usaha pengembangan ekonomi. Karena itu, pola kluster kemudian menjadi salah satu pendekatan (*approach*) yang menjadi rekomendasi sejumlah ilmuwan dan dipakai oleh pengambil kebijakan di dalam mengembangkan industri di suatu daerah atau negara.

Alfred Marshall merupakan ekonom generasi pertama yang serius melihat potensi kluster industri bagi terdorongnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya setelah dia mencermati berkembangnya sentra-sentra industri di Inggris, Jerman dan di negara-negara lain di Eropa pada peralihan abad ke-19 menuju abad ke-20. Dalam pandangan Marshall, sentra-sentra industri itu, yang di dalamnya terdapat industri kecil dan menengah (IKM), telah memperoleh keuntungan karena berada di dalam suatu wilayah yang berdekatan (*geographical proximity*). Di antaranya adalah tersedianya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan (*labour pool*) dan adanya pertukaran informasi dan gagasan (*knowledge spill-over*) (Marshall, 1920:267-277).

Keuntungan-keuntungan yang didapat dari kedekatan dengan perusahaan-perusahaan lain itu disebut penghematan eksternal (*external economies*). Keuntungan demikian berbeda dengan keuntungan akibat penghematan internal (*internal economies*), yakni penghematan-penghematan biaya yang terjadi di dalam suatu unit

perusahaan itu sendiri, termasuk adanya efisiensi.

Hanya saja, adanya *external economies* itu tidak serta merta melahirkan adanya kluster industri yang dinamis. Huber Schmitz (1995b) mengemukakan bahwa kluster industri bisa berlangsung secara dinamis dan menguntungkan unit-unit usaha yang ada di dalamnya kalau mampu melahirkan apa yang disebut '*collective efficiency*' (efisiensi kolektif). Yang dia maksud sebagai '*collective efficiency*' adalah keunggulan kompetitif yang disebabkan oleh *external economies* dan *joint action* (aksi bersama).

Efisiensi kolektif yang disebabkan oleh *external economies*, dalam pandangan Schmitz, pada dasarnya bersifat pasif. Keuntungan yang diperoleh lebih banyak disebabkan oleh lokasi yang sama. Melalui lokasi yang sama ini, perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya secara mudah bisa memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. Lokasi yang sama juga akan memudahkan perusahaan-perusahaan itu berhubungan dengan para *suppliers* dan *buyers*.

Relasi antar perusahaan yang ada di dalam kluster itu akan bersifat dinamis manakala perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya mengadakan aksi bersama. Aksi bersama itu, khususnya, berkaitan dengan upaya untuk mengatasi masalah bersama. Ketika IKM itu menghadapi masalah permodalan, misalnya, mereka bisa membentuk kelompok dan membuat kerangka kerja penjaminan bersama ketika harus berhubungan dengan bank-bank yang akan memberi pinjaman. Demikian juga ketika menghadapi masalah-masalah lain seperti masalah teknologi dan pemasaran

hasil-hasil produksi.

Di dalam aksi bersama itu tidak berarti bahwa semua perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kluster industri itu serentak melakukan hal yang sama. Aksi bersama itu bisa dilakukan oleh sekelompok kecil perusahaan. Di dalam proses produksi, misalnya, ada perusahaan-perusahaan yang melakukan penggarapan sampai setengah jadi, sedangkan proses penyelesaiannya (*finishing*) bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan demikian, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain terdapat relasi yang saling menguntungkan.

Di Indonesia, sebagian besar kluster industri yang ada lebih cenderung hanya sampai pada perolehan keuntungan yang disebabkan oleh lokasi yang sama (*external economies*). Sementara itu, tambahan keuntungan lainnya, yaitu adanya *joint action* antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain masih jarang ditemukan. Studi yang dilakukan oleh Hastu Prabatmodjo (1999) di industri kerajinan kulit di Cibaduyut, misalnya, menemukan fakta bahwa kompetisi di antara industri-industri yang ada itu lebih mengedepan daripada kerjasama. Konsekuensinya, terjadi persaingan yang tidak sehat. Implikasi dari realitas demikian adalah bahwa kluster industri yang ada di Indonesia masih cenderung pasif dan belum dinamis.

Supratikno (2004:124-25) mengklasifikasikan kluster industri di Indonesia ke dalam empat kelompok. Yang pertama adalah apa yang dia sebut sebagai '*dormant cluster*', yang sebagian besar didominasi oleh sektor informal. Menurut

Supratikno, lebih dari 90 persen kluster industri di Indonesia terkatagori di dalam kelompok ini. Kedua adalah '*active cluster*'. Kelompok kedua ini mulai mampu memperbaiki teknologi yang dimiliki dan memperbaiki kualitas produksinya. Tetapi produk-produknya masih cenderung dipasarkan di dalam negeri. Ketiga adalah '*dynamic cluster*'. Di samping mulai mampu memperbaiki teknologi dan kualitas teknologi, kluster kelompok ini mulai mampu membangun jaringan di dalam memasarkan produknya di luar negeri. Terakhir adalah '*modern or advanced cluster*'. Kelompok demikian telah mampu menerapkan teknologi tingkat tinggi guna memproduksi barang-barang yang berkualitas dan mampu memasarkan produknya, baik di pasar domestik maupun internasional.

Melihat realitas seperti itu, upaya mengembangkan sektor industri melalui pendekatan kluster masih memerlukan kerja keras. Hal ini terjadi karena sebagian besar kluster industri di Indonesia masih bercorak pasif dan lebih mengandalkan *external economies*. Upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengangkat kluster industri itu sehingga bisa bercorak yang lebih dinamis, walaupun tidak sampai yang bercorak modern.

Tetapi, upaya itu jelas tidak mudah dilakukan. Untuk menumbuhkan terdapatnya *joint action*, misalnya, dibutuhkan adanya modal sosial (*social capital*) yang kuat, yakni adanya saling percaya (*trust*) antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dengan demikian, masing-masing perusahaan tidak hanya berpikir bagaimana

memajukan diri sendiri, melainkan berpikir tentang bagaimana maju bersama-sama. Perasaan demikian mungkin bisa terbangkitkan manakala masing-masing menyadari bahwa mereka harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di luar kluster dan produk-produk impor. Melalui *joint action*, mereka bisa mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan merumuskan langkah bersama tentang bagaimana memecahkannya.

Secara kultural, kita sebenarnya memiliki landasan untuk mengembangkan modal sosial seperti itu. Misalnya saa, kita pernah memiliki budaya gotong royong, kita juga menganut agama yang menganjurkan berbuat jujur, saling menghormati, dan suka tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sayangnya, nilai-nilai yang memungkinkan munculnya *joint action* itu justru sering kita abaikan. Konsekuensinya, seperti yang terjadi di Cibaduyut itu, kluster industri di Indonesia kurang mampu berkembang secara baik. Konsekuensinya, IKM di Indonesia akan terus kesulitan berkembang menjadi industri-industri yang mampu bersaing di pasar internasional.

Belakangan Huber Schmitz (1995a) sendiri menyadari bahwa kluster industri itu tidak hanya membutuhkan apa yang disebut sebagai efisiensi kolektif guna menjadikan dirinya sebagai kluster yang dinamis. Bagaimanapun juga, kluster industri itu harus mampu bersaing di pasar internasional untuk memasarkan produk-produknya. Untuk itu, kluster industri itu perlu selalu melakukan perbaikan (*upgrading*) terhadap teknologi dan kualitas produk yang

dimilikinya, di samping memiliki kemampuan mengembangkan jaringan (*networking*) dengan para pelaku di pasar internasional.

Memahami saran terakhir Schmitz itu, upaya mengembangkan kluster industri semakin berat. Pemerintah perlu secara terus menerus mendorong adanya teknologi baru bagi kluster industri yang ada, di samping tersedianya kualitas tenaga kerja yang memadai. Meperintah juga perlu terus menerus mengingatkan pada pelaku industri di kluster tentang pentingnya modal sosial di dalam berusaha. Kalau tidak, industri-industri yang ada di Indonesia bukan hanya tidak akan mampu bersaing di pasar internasional, melainkan juga akan tergilas di negeri sendiri. Yang terakhir ini terjadi seiring dengan masuknya produk-produk impor secara besar-besaran, baik yang legal maupun yang ilegal.

Penutup

Potensi IKM di Indonesia sebenarnya sangat besar. Hanya saja, potensi yang besar itu belum termaksimalkan. Salah satu kelemahan dari sektor industri yang mengelompok (*clustered*) adalah bahwa mereka cenderung hanya menikmati keuntungan-keuntungan akibat lokasi yang sama (*external economies*). Mereka belum maksimal memanfaatkan jaringan untuk bekerjasama (*joint action*) guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Ke depan, agar IKM itu bisa terus tumbuh berkembang, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong munculnya modal sosial di antara pelaku

usaha di kelompok kluster, *upgrading* teknologi dan kualitas produk, dan *networking* di pasar internasional.

Daftar Pustaka

- Aswicahyono, H., 1997. 'Transformation and Structural Change in Indonesia's Manufacturing Sector', dalam M.E. Pangestu and Y. Sato (eds), *Waves of Change in Indonesia's Manufacturing*, Institute of Developing Economies, Tokyo:1-28.
- Bolnick, B.R., 1982. 'Concessional Credit for Small Scale Enterprise', *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 18(2):65-85.
- Grizzell, S., 1988. 'Promoting Small Scale Manufacturing in Indonesia: What Works?' *DPS Research Memo* No. 17, Jakarta.
- Hamid, A., 1991. 'The Development of Small Scale Industries in Indonesia: View on Central Government Policies,' *V.R.F. Series* No 184, Yokyo.
- Hayashi, M., 2002. 'SME Development and Subcontracting in Indonesia : A Comparison with Japan's Historical Experience,' PhD Thesis, The Australian National University, Canberra.
- Hill, H., 2001. 'Small and Medium Enterprises in Indonesia', *Asian Survey*, 41(2):248-70.
- Hughes, H., 1984. 'Industrialization and Development: A Stocktaking', dalam P.K. Gosh (ed.), *Industrialization and Development*, Greenwood Press, Westport:5-29.
- Klapwijk, M., 1997. 'Rural Industry Clusters in Central Java, Indonesia: An Empirical Assessment of Their Role in Rural Industrialization,' PhD Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam.
- Levitsky, J., 2001. 'Innovations in the Financing of Small and Microenterprises in Developing Countries', *SED Working Paper No 22/E*, Geneva.
- Maddison, A., 1989. 'Dutch income in and from Indonesia, 1700-1938', dalam A. Maddison and G. Prince (eds), *Economic Growth in Indonesia, 1820-1940*, Foris Publications, Dordrecht:15-41.
- Marshall, A., 1920. *Principles of Economics*, 8, MacMilland and Co., London.
- Pangestu, M.E., 1996. 'Financing Small Scale Business: the Indonesian Experience', dalam M.E. Pangestu (ed.), *Small Scale Business Development and Competition Policy*, CSIS, Jakarta:27-46.
- Pangestu, M.E. and Sato, Y., 1997. 'Introduction', dalam M.E. Pangestu and Y. Sato (eds), *Waves of Change in Indonesia's Manufacturing Industry*, Institute of Developing Economies, Tokyo:xi-xvi.
- Poot, H., Kuyvenhoven, A. and Jansen, J.C., 1990. *Industrialisation and Trade in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Porter, M.E., 1990. *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York.
- Prabatmodjo, H., 1999. 'Prospects for Flexible Specialisation in Less Developed Countries: the Case of Small Scale of Footwear Production in Cibaduyut, Bandung, Indonesia,' PhD Thesis, University of Queensland, Queensland.
- Sandee, H., 1995. 'Innovation Adoption in Rural Industry: Technological Change in Roof Tile Clusters in Central Java,' PhD Thesis, Vrije Univrsiteit, Vrije.
- Schmitz, H., 1995a. 'Small Shoemakers and Fordist Giants: Tale of a Supercluster', *World Development*, 23(1):9-28.

- Schmitz, H., 1995b. 'Collective Efficiency: Growth Path for Small Scale Industry', *The Journal of Development Studies*, 31(4):529-66.
- Schmitz, H. and Nadvi, K., 1999. 'Clustering and Industrialization: Introduction', *World Development*, 27(9):1503-14.
- Supratikno, H., 2004. 'The development of SME Clusters in Indonesia', dalam D. Hew and L.W. Nee (eds), *Entrepreneurship and SMEs in Southeast Asia*, ISEAS, Singapore:119-30.
- Tambunan, T., 2000. *Development of Small-Scale Industries During the New Order Government in Indonesia*, Ashgate, Singapore.
- Thee, K.W., 1989. *Cooperation in Small and Medium Scale Industries in Asean Technology, Part B*, PEP-LIPI.
- Thee, K.W., 1993. 'Industrial Structure and Small and Medium Enterprises Development in Indonesia', *EDI Working Papers*, Washington.
- Weijland, H., 1999. 'Microenterprise Clusters in Rural Indonesia: Industrial Seedbed and Policy Target', *World Development*, 27(9):1515-30.